

PARADOKS GENDER
(Kajian Feminisme Etis terhadap Kemunculan *Inong Balee*
dalam Kekerasan Politik di Aceh)

Oleh:
Hastanti Widy Nugroho
Siti Murtiningsih

Abstract

This research aims to get understanding about a definition and a concept of *Inong Balee* in a political violence in Aceh; secondly, to get an evidence of gender paradox in the *Inong Balee*'s role and existence in Aceh; thirdly, to criticize the concept of *Inong Balee*'s gender paradox from Ethical Feminism viewpoint; fourthly, all of them are formulated as a recommendation for a resolution of the political violence in Aceh. The result of this research is the *Inong Balee* is a general term to show 'a widow', so that the *Inong Balee* is not a woman group's name of National Liberation Front of Aceh (GAM=Gerakan Aceh Merdeka). The role of *Inong Balee* as mother bearing and educating children in a domestic region can make a balance with their role as a family head who must struggle in a public region to replace their husband. According to Ethical Feminism, values developed by *Inong Balee* actually represent the feminine values like patience, mildness, and peacefulness.

Keywords: Inong Balee, gender paradox, feminism

A. Pendahuluan

Penelitian ini hendak membahas adanya paradoks dalam perilaku subjek penelitian, yaitu *Inong Balee* (janda), dalam memahami kedudukannya sebagai perempuan yang harus patuh dan tunduk pada hukum adat dan syariat Islam yang sangat patriarkhat serta harus berperan secara penuh dalam wilayah domestik di satu sisi. Sementara itu, di sisi lain, peran *Inong Balee* sebagai janda yang ditinggal mati suami menuntut untuk berjuang sebagai kepala keluarga sekaligus berperan aktif di wilayah publik. Kenyataan tersebut merupakan hal yang paradoksal, dan patut dikaji lebih men-

dalam dengan menggunakan perspektif Feminisme Etis. Sampai di sini keterkaitan tema dengan judul sangatlah relevan, menyangkut perilaku manusia (*Inong Balee*) dengan lingkungan binaan (yaitu Aceh) sebagai daerah konflik, yang hendak dikaji dengan menggunakan sudut kajian Feminisme Etis. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman baru, tentang konsep dan kedudukan *Inong Balee* berdasar refleksi kritis Feminisme Etis. Pemahaman baru tersebut nantinya akan sangat berharga bagi penyusunan resolusi kekerasan politik di Aceh yang melibatkan perempuan sebagai agen perdamaian.

B. Kekerasan Politik di Aceh.

1. Selayang Pandang Kekerasan di Aceh

Kekerasan bagi masyarakat Indonesia seakan sudah menjadi bagian tidak terpisahkan. Jika kita menilik sejarah, kita dibesarkan dalam budaya dendam dan kekerasan. Para raja di Jawa zaman dulu sebelum naik tahta kekuasaan selalu membunuh raja yang tengah berkuasa untuk meraih kekuasaan. Fenomena ini bisa dilihat pada masa Tunggal Ametung, Ken Arok, Gajah Mada dan Prabu Siliwangi. Kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, praktik kekerasan terus berulang dan memakan korban jiwa dalam jumlah yang tidak kecil. Fenomena kekerasan lain bisa dilihat saat Belanda berkuasa di Indonesia. Menurut Profesor Henk Schulte Nordholt dari Universitas Amsterdam, pemerintah kolonial Belanda berperan besar atas munculnya budaya kekerasan di Indonesia. Pada 1885-1910 sebanyak 100.000-125.000 orang tewas menjadi korban pemerintah kolonial Belanda. Korban paling banyak di Aceh. Karena saat itu Belanda mengirimkan pasukan Marsose yang menewaskan 75.000 warga sipil Aceh. Tindakan ini diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah jajahan Belanda.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, kekerasan politik ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh rezim untuk memperoleh, mendukung, dan mengawetkan kekuasaan. Praktek kekerasan politik antara lain berupa, intimidasi, teror, penculikan, penyiksaan, ancaman dibunuh dan lain-lain (Bhakti, 2001).

Dalam perjalanan sejarah Aceh, wacana kekerasan tidak pernah surut. Sejak masa penjajahan Belanda (1878-1904), jumlah korban saat itu sekitar 60-70 ribu, ditambah dengan 25.000 buruh

paksa dan yang meninggal karena sakit dan cacat. Total jumlah korban mencapai 100.000 orang.

Terlepas dari penjajahan Belanda, ternyata Aceh masuk dalam kubangan penderitaan lebih lanjut akibat "dijajah" bangsa sendiri. Mulai kasus DI/TII yang dipimpin Daud Beureu'eh yang diperkirakan menelan korban ratusan korban jiwa. Kekerasan di Aceh mencapai puncaknya pada masa Orde Baru. Pada masa ini kekerasan di Aceh dilakukan oleh negara yang mengatasnamakan penumpasan terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kekerasan yang tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat Aceh adalah ketika diberlakukannya Daerah Operasi Militer (DOM) selama 1989-1999 (Yusuf, 2003). Korban yang tercatat pada masa ini sekitar 5000 orang.

2. Sekilas tentang Wanita Aceh

Wanita Aceh melebihi kaum wanita bangsa-bangsa lainnya dalam keberanian dan tidak gentar hati, mati bahkan mereka pun melampaui laki-laki. Bukan sebagai wanita yang lemah dalam mempertahankan cita-cita dan agama mereka, menerima hak asasi di medan juang dan melahirkan anak-anak mereka di antara dua serbuan penyeragaman. Mereka berjuang bersama-sama suaminya, kadang-kadang di samping atau di depan dan dalam tangan yang mungil itu kelewang dan rencong menjadi senjata yang berbahaya. Wanita Aceh berperang di jalan Allah, mereka menolak segala macam kompromi. Itulah kalimat bernada kekaguman yang dilontarkan seorang koprал marsose veteran Perang Aceh, H.C.Zentgraff (Kompas, 2003). Kekaguman tersebut diungkapkan berkaitan dengan sepak terjang Tjut Nyak Dien, sebagai pejuang perang Aceh, seratus tahun lalu, ketika berhadapan dengan Belanda.

Apa yang dikemukakan oleh Zentgraff memang benar. Sepak terjang perempuan Aceh selama ini memang tidak dapat diragukan lagi. Banyak sekali pejuang perempuan Aceh yang mempunyai keberanian untuk berjuang mengusir penjajah, di antaranya adalah Laksamana Keumala Hayati. Dia memimpin armada Aceh melawan Belanda dan menurut sejarah, Keumala Hayati memiliki seratus kapal perang dan setiap kapal perang dapat mengangkut 400 prajurit atau tentara. Pada masa Kepemimpinan Sultan Muda Ali Riayat Syah V (1604-1607) dibentuk pasukan pengawal istana, *Si Pai Inong* (prajurit perempuan) dipimpin Laksamana Leurah Ganti dan Laksamana Muda Tjut Meurah Inseuen. Pada masa Sul-

tan Iskandar Muda (1607-1636) dibentuk divisi pengawal istana yang terdiri atas prajurit perempuan dengan nama Divisi Keumala Cahaya yang dijadikan Batalyon Kawal Kehormatan. Selain itu, kepemimpinan perempuan Aceh sudah dibuktikan dengan adanya empat orang perempuan penerus pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang telah memerintah Aceh selama 60 tahun (1641-1699). Mereka adalah Sri Sultanah Tajul alam Safiah Ad-din. Kedua, Sultanah Nurul Alam Natiyyah Ad-din, Sri Sultanah Zakiah Ad-din Johar Shah, keempat, Sultanah Kemala Ad-din (Sunny,1980).

Berdasar bukti-bukti tersebut, menurut Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, dari Program Pengajian Serantau, Universiti Walailak di Thailand, emansipasi perempuan telah terjadi di Aceh jauh sebelum munculnya Kartini. Kartini muncul pada abad ke-19, sedangkan Keumala Hayati dan para ratu memimpin Aceh pada abad ke-17. Inilah yang merupakan titik awal bahwa tidak pernah terjadi dikotomi antara peranan perempuan dan lelaki di Aceh (www.RSI.htm., 2005).

Ketabahan hati sekaligus keberanian diri yang dimiliki perempuan Aceh, sesungguhnya diperoleh dari pengalaman selama masa peperangan dan kekerasan yang berlangsung hampir 30 tahun. Penjajahan Belanda serta pendudukan militer Indonesia semasa Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), telah menjadikan perempuan Aceh terbiasa dengan peperangan dan kekerasan. Keberanian perempuan mengangkat senjata melawan siapa saja yang menduduki Tanah Rencong telah dibuktikan sejak awal kedatangan Belanda di wilayah Nusantara. Tjut Nyak Dhien, Tjut Nyak Mutia, Pocut Baren, Tjut Meurah Intan, Laksamana Kemala Hayati, adalah deretan nama perempuan Aceh yang terkenal dengan kegigihannya melawan penjajah. Mereka inilah yang menurut bahasa Aceh disebut dengan *Inong Balee*, perempuan yang menjanda karena ditinggal suami. Pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah IV kemenakan Sultan Iskandar Muda (1589-1604) dibentuk pasukan dengan nama *Inong Balee* yang dipimpin oleh Laksamana Kemala Hayati. Pasukan ini terdiri atas para janda (*Inong Balee*) prajurit yang telah tewas.

3. Kekerasan Politik serta Akibatnya bagi Perempuan

Perang, konflik dan kekerasan di wilayah dunia manapun, pastilah menimbulkan banyak korban, dan korban terbesar adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anaklah yang pa-

ling merasakan situasi konflik serta akibat yang ditimbulkannya. Tidak jarang perempuan dan anak-anak justru menjadi sasaran tindak kekerasan dalam wilayah konflik. Kekerasan terhadap perempuan dalam daerah konflik merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional karena pada prinsipnya perempuan, orang tua dan anak-anak harus dilindungi dalam wilayah perang, bukan justru dijadikan sasaran. Namun demikian, oleh pihak yang sedang terlibat dalam konflik, perempuan seringkali justru menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan lawan, menimbulkan teror dan menghancurkan martabat perempuan. Hal ini juga terjadi di Aceh, kekerasan terhadap perempuan telah terjadi dalam skala yang luas. Banyak perempuan yang menutup kasus yang menimpa diri mereka disebabkan oleh ancaman oleh pelaku maupun stigmatisasi dalam masyarakat. Selain takut dengan ancaman pelaku, korban juga merasa bahwa apa yang telah mereka alami merupakan aib bagi mereka, keluarga dan masyarakat. Perempuan telah menjadi korban terbesar dalam perang, padahal sesungguhnya mereka adalah pemrakarsa terbesar bagi usaha perdamaian.

Jika dihitung sejak tahun 1989-2004 atau selama 15 tahun, rata-rata setiap tahun Aceh menghasilkan 933 janda cerai mati karena suami meninggal dunia atau hilang tak tahu rimbanya. Tak pelak, beban menjadi orangtua ini menjadi sangat berat bagi seorang janda. Secara fisik mereka menjadi orangtua tunggal dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, serta menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Sementara itu secara psikis mereka mengalami trauma berat, sebagai akibat menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana suaminya diculik atau bahkan dieksekusi berceceran darah. Walhasil, janda itu pun memikul trauma berat sehingga kehilangan gairah hidup. Para perempuan inilah yang dalam bahasa Aceh disebut *Inong Balee*, korban kekerasan politik di Aceh (www.sinarharapan.co.id)

C. INONG BALEE

1. Sejarah dan Pengertian Istilah *Inong Balee*

Di kalangan masyarakat Indonesia (selain Aceh), selama ini telah terbangun opini bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah sebuah gerakan pemberontakan rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, pantaslah kiranya jika stigma buruk diberikan

kepada GAM sebagai institusi serta petinggi-petinggi GAM sebagai individu. Bagaimana halnya dengan *Inong Balee*? Istilah *Inong Balee*, muncul dan marak digunakan oleh media massa Indonesia selama konflik di Aceh, terutama pada periode 1980-2000. Pada masa ini banyak pemberitaan di media massa meliputi sepak terjang dan tertangkapnya *Inong Balee*. Berikut beberapa petikan judul pemberitaan di media massa tentang *Inong Balee*; "*Inong Balee, Dendam Janda Beranak Dua*", "*Seorang Inong Balee mendatangi Pos SATTIS-73 Trumon*", "*Laskar Inong Menyabung Nyawa*", "*Inong Balee, Tentara Wanita GAM*". *Inong Balee*, selama ini lebih dikenal masyarakat sebagai pasukan perempuan yang dimiliki oleh GAM. Nah, jika GAM saja mempunyai stigma buruk di mata masyarakat Indonesia, apalagi dengan *Inong Balee*. Pasukan yang terdiri atas para perempuan memberontak terhadap NKRI, tentulah yang muncul adalah pandangan negatif terhadap para perempuan tersebut. Terbayang sudah kekejaman dan kebengisan para perempuan itu ketika berhadapan dengan tentara Indonesia. Pandangan ekstrim muncul, ketika beberapa kalangan menyamakan *Inong Balee* dengan Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), sebuah organisasi perempuan, yang berada di bawah naungan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang juga sempat beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Apakah *Inong Balee* memang seperti itu?

Sejarah kemunculan *Inong Balee* dimulai ketika Sultan Aceh Al-Kahhar mengirim armada perang Aceh ke Malaka untuk menghancurkan kolonialisme Portugis. Kegiatan ini dilanjutkan oleh sultan-sultan yang kemudian yang mengirimkan armada laut serta darat melalui daerah timur dan barat Sumatera serta Melayu. Selama masa penyerangan itulah banyak sekali prajurit yang mati syahid dalam peperangan, sehingga isterinya menjadi janda yang dalam bahasa Aceh disebut *Inong Balee*. Ditinjau secara etimologis *Inong Balee*, berasal dari kata *Inong* dan *Balee*. *Inong* mempunyai arti 'perempuan', sedangkan *Balee* artinya 'teras rumah'. Jadi istilah *Inong Balee* dapat diartikan bahwa ketika suami meninggal dunia maka kedudukan perempuan bergeser ke garis depan (rumah), yang artinya menjadi kepala keluarga dan siap maju di wilayah publik.

Pada masa kepemimpinan Sultan Alaudin Riayat Syah IV kemenakan Sultan Iskandar Muda, yang memerintah tahun 1589-1604 H dibentuk sebuah armada yang sebagian prajuritnya terdiri

atas para janda (*Inong Balee*) pahlawan yang telah tewas. Armada ini diberi nama armada *Inong Balee* di bawah pimpinan Laksamana Malahayati. Dialah laksamana perempuan pertama di Asia kala itu. Armada *Inong Balee* yang dipimpinnya terdiri atas 2000 prajurit perempuan dengan dilengkapi kapal perang serta persenjataan lengkap.

Sebagai tempat berkumpulnya anggota pasukan perempuan tersebut, maka dibangunlah sebuah benteng dengan nama *Inong Balee*. Selain sebagai tempat berkumpul, benteng ini juga merupakan tempat pengintaian kedatangan kapal-kapal asing ke pelabuhan kerajaan Aceh. Dari benteng inilah *Inong Balee* turun bertempur di atas geladak kapal atau di daratan melawan Belanda dan Portugis (www.Kompas.com).

2. Perkembangan Penggunaan Istilah *Inong Balee*

Sekian lama istilah *Inong Balee* hanya digunakan sebagai nama benteng dan nama jalan di Banda Aceh. Orang hanya akan tahu istilah ini jika membuka dan membaca buku sejarah perjuangan rakyat Aceh.

Fenomena kemunculan istilah *Inong Balee* pada masyarakat umum, saat diberlakukannya "Operasi Jaring Merah" atau OJM di Daerah Istimewa Aceh--sebelum otonomi khusus diberikan kepada Aceh, sekitar tahun 1989. Operasi ini digelar karena adanya penyerangan secara sporadis terhadap pos polisi atau tentara di beberapa wilayah Aceh. OJM lebih banyak difokuskan kepada kegiatan intelijen, seperti penculikan, penangkapan dan berbagai bentuk kekerasan lain yang dilakukan aparat yang mestinya mengayomi masyarakat. Dampaknya, tentu saja memunculkan rasa tak simpatik di kalangan masyarakat Aceh. Oleh karena itu banyak kaum tua dan juga kaum muda bergabung dengan GAM. Tidak ketinggalan para janda yang suaminya hilang atau meninggal dunia karena perlakuan aparat, akhirnya ikut pula bergabung. Dari sinilah muncul *Inong Balee* atau tentara perempuannya Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Gubernur GAM, pasukan *Inong Balee* saat ini sudah memiliki anggota mencapai ribuan orang dan tersebar di seluruh wilayah Aceh. Rekrutmen mereka tergolong ketat dan harus didasari keinginan sendiri serta mendapat izin dari orangtua. Bahkan, seorang pemimpin GAM di Wilayah Batee Iliiek mengakui banyak orangtua yang menyatakan gembira jika anak gadisnya dapat

diterima sebagai anggota *Inong Balee*. Setiap anggota *Inong Balee*, selain mendapat latihan militer, juga diberikan pendidikan agama serta hukum internasional, hukum humaniter, serta pendidikan intelijen. Setelah mengikuti latihan sampai berbulan-bulan di komando GAM setiap wilayah, para janda ini ada yang langsung bergerilya di hutan-hutan dan banyak juga yang bertugas sebagai intelijen. Salah satu sifat yang menonjol pada wanita adalah telaten dan jeli. Oleh karena itu pula, kepada mereka lebih banyak dibebankan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kejelian. Maka tak perlu diherankan jika di jajaran GAM Wilayah Pase (Aceh Utara) pekerjaan merakit bom dan granat lebih dipercayakan kepada pasukan *Inong Balee* (www.indomedia.com/serambi/kontras/).

Julukan *Inong Balee* sebagai tentara perempuan diberikan oleh Panglima GAM Tengku Abdullah Syafei. Tetapi nama itu sempat diganti menjadi Laskariyah dengan arti yang sama sebagai tentara wanita GAM. Nama itu diberikan Panglima GAM Wilayah Jeunib yakni Tengku Darwis Jeunib. Sebutan itu berubah dan kembali ke julukan seperti sebelumnya. Dari *Inong Balee* menjadi Laskariyah dan kembali jadi *Inong Balee*.

Jacqueline Siapno, seorang peneliti Aceh dari Philipina menyebutkan bahwa fenomena *Inong Balee* merupakan bentuk politik perempuan Aceh di dalam wilayah konflik. Keberadaan *Inong Balee*, membuktikan bahwa perempuan mempunyai kemampuan untuk tampil sebagai perantara (agen) yang melakukan sejumlah muslihat, semacam negosiasi, dengan aparat militer. Muslihat, dalam pemaknaan orang Aceh, adalah strategi bertahan menghadapi tekanan, yang jika dijabarkan meliputi, pertama, kemampuan memimpin di belakang layar dan bukan di garis depan. Kedua, kemampuan menggunakan bahasa tubuh sesuai dengan situasi. Ketiga, kemampuan merayu sebagai ungkapan negosiasi yang taktis. Keempat, kebijaksanaan untuk membaca di balik ihwal yang tampak tak penting namun sebenarnya penting. Kelima, menunggu dan sabar, mengulur keadaan, namun bukan berarti kompromi. Kisah muslihat ini terdapat dalam puisi Aceh lama, yang disebut *lheur jago meulet*, (*lheur* adalah sejenis burung) yang menggunakan kecerdikan dan daya pikatnya untuk menghadapi musuh (Siapno, 2002).

Politik perempuan Aceh di tengah konflik bersenjata dan kekerasan negara adalah dengan menggunakan strategi *lheur jago meulet*. Strategi ini bukan berarti "tidur seranjang dengan musuh",

akan tetapi mengandalkan kemampuan perempuan untuk mengolah segala potensi yang dimiliki dengan keperempuannya untuk mengalahkan musuh.

Menurut Martian Damanik, saat ini istilah *Inong Balee* memiliki konotasi negatif. Pengertian *Inong Balee* adalah pasukan perempuan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Menurut GAM, *Inong Balee* adalah perempuan yang suaminya mati pada masa daerah Operasi Militer (DOM) atau pada masa penjajahan Belanda zaman dulu (Damanik, 2003).

Sementara itu menurut Murizal Hamzah, *Inong Balee* dalam bahasa Aceh adalah sebutan bagi istri yang ditinggalkan suami, baik cerai mati atau cerai hidup. Pemahaman *Inong Balee* dalam konteks ini merujuk pada perempuan yang suaminya hilang, baik karena konflik bersenjata maupun tidak. Jadi *Inong Balee* bukanlah anggota militer sayap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Hamzah, 2004). Kesalahpahaman masyarakat awam terhadap arti *Inong Balee* sebagai pasukan perempuan GAM, sesungguhnya tidak terlepas dari pengertian awal pihak militer Indonesia yang menyebut laskar perempuan GAM dengan sebutan *Inong Balee* (www.sekitarkita.com/comments).

Dalam setiap publikasi di media massa selalu ditampilkan sosok *Inong Balee* sebagai perempuan berjilbab dan berseragam militer lengkap dengan senjata di tangan. Hal ini diakui oleh salah seorang Komandan *Inong Balee* Wilayah Pase. Sebagai komandan dia mengaku pernah memiliki anak buah 472 personel. Dua ratus personel di antaranya sudah mengikuti latihan perang yang diberikan senior GAM di Pase. "Mereka mahir menggunakan berbagai jenis senjata." Sementara yang 272 lainnya hanya mendapat pendidikan intelijen dan belum pernah mengikuti latihan fisik. Meski begitu, Meutia menyatakan mereka bisa menggunakan senjata pistol berbagai kaliber (www.WestPapuaNewsOnline.com). Masih menurut Cut Meutia, dia memutuskan bergabung menjadi anggota *Inong Balee* karena dendam atas kematian suaminya serta untuk melawan kesewenang-wenangan TNI terhadap rakyat Aceh. Para *Inong Balee* ini selain bergerak di bawah tanah, sebagai mata-mata juga secara fisik berperang melawan TNI. Mereka mengangkat senjata di usia yang masih muda kurang dari 20 tahun, meskipun sudah menyandang predikat janda.

Terlepas dari berbagai fakta tentang perempuan Aceh yang gagah berani, berjuang menggantikan suami sebagai kepala keluar-

ga saat suami meninggal dunia, serta membalas dendam atas kematian suami di medan perang hingga berperang mengusir penjajah, terdapat satu fakta yang harus diterima bahwa perempuan bagaimanapun saat ini sedang hidup di dunia laki-laki. Berbagai fakta tentang kehebatan perempuan Aceh sebagai pemimpin (ratu) sejak abad ke-17 dan banyak memberi inspirasi pada bangsa-bangsa lain, ternyata seringkali masih menjadi fakta tersembunyi atau tidak diakui. Hal ini seperti dikemukakan Asvi Warman Adam, munculnya perempuan raja di Aceh dan Patani tahun 1584 dan 1641 terjadi karena tidak ada calon raja yang berjenis kelamin laki-laki. Kitab Tajus Salatin (Mahkota Segala Raja-Raja) yang disusun Buchari al-Jauhara tahun 1603, amat menentang penguasa perempuan, tetapi bisa menerima putri raja menjadi raja guna menghindari keadaan lebih parah, dengan syarat tidak adanya ahli waris laki-laki. Lebih lanjut, disebutkan dalam kitab Tajus Salatin bahwa prinsip keadilan merupakan landasan utama negara. Untuk mewujudkan keadilan, sang penguasa harus: akil balig, berilmu, rupawan, dermawan, selalu mengingat jasa baik orang lain, berani, selalu mengingat masalah kerajaan. Secara eksplisit disebutkan "hendaklah raja itu laki-laki karena perempuan kurang budinya", menjauhi bercampur dengan perempuan, mencari menteri yang berilmu dan berbudi (Kompas 28 Desember 2004). Jadi, menurut kitab itu, keadilan lebih mungkin diwujudkan dalam kepemimpinan laki-laki.

Hal tersebut tentu sangat berbeda dengan kesaksian Syekh Nurrudin Ar-Raniry dalam bukunya Bustanus Salatin yang menuliskan :

Bandar Aceh Darussalam masa itu (pemerintahan Ratu Safiatuddin) terlalu makmur, dan makanan pun sangat murah, dengan segala manusia pun dalam kesentausaan dan mengikuti segala barang sabdanya. Dan ialah yang adil pada segala barang hukumnya dan tawakkal pada segala barang pekerjaannya dan sabar pada segala barang halnya, lagi mengerasi segala durhaka (Iskandar, 1966).

Pandangan yang agak netral dikemukakan oleh Ilyas Sultan Pamenan dalam buku "Rencong Aceh di Tangan Wanita",
...Rakyat Aceh yang mula-mula dengan perasaan sangsi memilih Sri Ratu Tajul Alam sebagai Sulthan dan melakukan semata-mata karena tidak ada kaum kerabat almarhum

Sulthan Iskandar Muda yang laki-laki, yang akan dapat mereka pilih, merasa sekarang, bahwa pilihan itu tidak begitu salah. Perjuangan baginda untuk mempertahankan nasib rakyatnya cukup ulung untuk membangkitkan rasa hormat dan ta'jub pada penduduk Aceh, sungguhpun rakyat-rakyat di daerah takhluk tidak merasa dirinya tidak mendapat perlindungan secukupnya (Sultan, 1957).

D. FEMINISME ETIS

Feminisme Etis merupakan salah satu aliran Feminisme Gelombang Ketiga yang menekankan etika kepedulian dalam melakukan gerakannya. Etika Kepedulian merupakan etika khas perempuan yang dilawankan dengan etika keadilan yang khas laki-laki (Arivia, 2003: 278). Etika Kepedulian mengedepankan aspek empati dan simpati dalam memperjuangkan kedudukan perempuan, sehingga tidak ada aspek kekerasan seperti dilakukan Feminisme Radikal. Hal ini jelas berbeda dengan etika keadilan yang mengedepankan unsur kewajiban, penegakan keadilan meskipun dengan cara kekerasan, di antaranya pendekatan militeristik (Zubaidah, 2003 dalam www.kompas.com). Salah satu tokoh Feminisme Etis adalah Carol Gilligan yang terkenal dengan bukunya "In Different Voice", melalui buku ini Gilligan banyak berbicara tentang perempuan yang hendaknya memiliki ukuran nilai moral yang berbeda dengan laki-laki. Nilai moral khas laki-laki selama ini telah terinternalisasi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, sehingga yang berkembang adalah nilai kekerasan yang berusaha menundukkan dan mendominasi manusia lain (Humm, 1992: 219). Oleh karena itulah perlu dimunculkan "Suara Yang lain", yaitu suara perempuan untuk mengimbangi "dunia laki-laki" yang cenderung kaku, keras dan kasar (termasuk militeristik). Pandangan kaum Feminis Etis ini sesungguhnya sangat tepat jika dianalogkan dengan keberadaan alam semesta yang terdiri atas berbagai hal yang berlawanan, berpasangan tetapi keberadaan satu dengan yang lain saling mengandaikan, seperti keberadaan berbagai hal yang terdapat di alam yang bertujuan saling melengkapi, bukan saling mensubordinasi bahkan meniadakan. Dapat dicontohkan keberadaan konsep *yin-yang* dalam kosmologi Cina merupakan prinsip eksistensi, baik yang bersifat aktif dan reseptif atau pria dan wanita (Megawangi, 1999: 101). Prinsip eksistensi ini mengandaikan adanya alam semesta beserta isinya juga disebabkan oleh prinsip ini. Dengan de-

mikian tanpa kedua prinsip yang saling berlawanan tersebut, alam akan mengalami ketimpangan. Keberadaan prinsip androgenitas juga tampak pada simbol feminin dan maskulin yang telah lama dikenal dalam sejarah Indonesia kuno, yaitu *lingga* dan *yoni* sebagai simbol aspek jantan dalam bentuk tiang dan aspek wanita dalam bentuk wadah. Tinjauan dari sudut pandang psikologi juga memperlihatkan aspek feminin dan maskulin dalam diri manusia seperti dikemukakan oleh Carl Gustav Jung dalam istilah anima/prinsip keperempuanan dan animus/prinsip kelaki-lakian (Jung, 1987: 107).

Gerakan Feminisme Etis ini sesungguhnya sudah ada sejak abad ke-18, yaitu ketika para pemikir seperti Mary Wollstonecraft dan J.S. Mill menulis buku bertema moralitas perempuan. Gerakan ini lebih berkembang dan lebih eksis, setelah diterbitkannya hasil penelitian Carol Gilligan berjudul *In a Different Voice : Psychological Theory and Women's Development*”, tahun 1982. Sejak itu keberadaan ide, gagasan dan pandangan tentang moralitas semakin sering digunakan sebagai landasan perjuangan perempuan (Card, 1988:125). Dalam mengungkapkan ide dan pendapatnya para Feminis Etis sesungguhnya lebih banyak menggunakan metode kritik, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Feminisme Etis sesungguhnya merupakan Feminisme Kritik. Gerakan feminis ini terutama ditujukan untuk dua hal, *pertama* yaitu usaha mengembangkan pengetahuan teoretis tentang moralitas untuk menghentikan penindasan terhadap perempuan dengan memberikan arah dan tujuan yang jelas. *Kedua*, mengembangkan wacana moralitas yang didasarkan atas pengalaman moral perempuan. Tujuan pertama tersebut sifatnya normatif, yaitu memberikan syarat-syarat atau rambu bagi perempuan untuk memperjuangkan eksistensinya; sedangkan yang kedua lebih diskriptif, menyangkut pengalaman moral perempuan yang kemudian dituangkan dalam sejumlah buku dan artikel tentang Feminisme Etis (Brenan, 1999:860). Feminisme Etis sesungguhnya mempunyai landasan teoretis yang bertumpu pada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Secara biologis terlihat jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai organ seks yang berbeda, sehingga akan membawa sifat maskulin dan feminin yang berbeda pula. Berdasar pandangan tersebut sudah sewajarnya jika laki-laki dan perempuan mengembangkan sifatnya masing-masing untuk mengembangkan diri. Sifat feminin seperti memelihara, mengasahi, dan kemampuan berkorban, meru-

pakan sifat dasar yang dimiliki perempuan sementara laki-laki dengan maskulinitas yang dimiliki cenderung lebih kuat untuk melindungi dan mempertahankan diri (Tong, 2000).

E. Refleksi Kritis terhadap Konsep dan Kedudukan *Inong Balee*

1. *Inong Balee* antara Tuntutan Syariat Islam dan Tuntutan Adat

Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya adat istiadat Aceh sangatlah menghargai kedudukan perempuan. Hal ini di antaranya tampak dengan adanya adat yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu adanya harta *peunulang* (pemberian) orangtua kepada anak gadisnya yang hendak menikah. Harta ini antara lain berupa rumah, atau jika tidak mampu sebuah kamar dengan dapur tersendiri, beberapa hewan peliharaan (sapi atau kerbau) serta beberapa petak tanah atau sawah. Rumah yang diberikan kepada anak perempuan disebut sebagai *rumoh peunulang* (rumah pemberian). Dengan adanya adat ini maka kedudukan perempuan di dalam rumah tangga sangatlah kuat, karena selaku pemilik rumah, isteri disebut *peurumoh* yang berasal dari kata *po rumoh* yang berarti yang empunya rumah. Dalam kondisi seperti ini tentulah si suami tidak dapat berbuat sewenang-wenang bahkan hingga mengusir isteri (Alfian, 1997). Adat ini sesungguhnya muncul pada masa pemerintahan Ratu Safiatudin, ketika dia mempunyai gagasan yang termuat dalam rencana undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Rakyat, yang salah satunya berisi kewajiban bagi orangtua untuk menyediakan sebuah rumah menurut kemampuannya kepada anak perempuan. Jika anak perempuan ini nanti sudah bersuami maka rumah itu akan diserahkan dan menjadi hak milik anak (Hasjmi, 1977).

Namun demikian, harus juga diakui bahwa nilai agama merupakan jantung kehidupan sosial-budaya masyarakat Serambi Mekkah. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kehidupan perempuan Aceh sangat ditentukan oleh budaya patriarkhi. Seorang perempuan Aceh, ketika sudah menikah maka dituntut untuk selalu tunduk, patuh dan setia sepenuhnya kepada suami, sebagai kepala keluarga. Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan..."Kaum laki-laki adalah pemimpin (*qawwaamuun*) atas kaum perempuan, karena Allah telah me-

lebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain...,” maka perempuan harus dapat diarahkan oleh suami. Jika seorang isteri sudah tidak dapat diatur oleh suami, maka perceraian sah-sah saja dilakukan.

Peran perempuan tersebut di atas semua akan berubah, ketika seorang perempuan ditinggal mati suami dan hidup menjanda. Status janda atau dalam bahasa Aceh disebut *Inong Balee* merupakan beban yang tidak mudah. Perempuan harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri termasuk kebutuhan anak-anaknya. Ia tidak lagi dapat bergantung pada siapapun.

Dalam kondisi demikian Syariat Islam yang mengharuskan setiap isteri yang ditinggal suami (menjadi janda) harus kembali kepada walinya, yaitu orangtuanya, karena tidak ada lagi pemimpin rumah tangga yang dapat mengawasi dan melindunginya. Namun demikian di sisi lain terdapat juga keinginan yang besar dalam diri *Inong Balee* untuk melanjutkan cita-cita suami serta menjaga dan melestarikan harta *peunulang* (pemberian) orangtua, jangan sampai hilang atau habis (Alfian,1997). Dalam kondisi seperti ini seorang *Inong Balee* baru diuji ketaatannya untuk memilih antara syariat Islam yang dipegang teguh ataukah mempertahankan adat-istiadat.

Jika dihubungkan dengan peran *Inong Balee* (versi GAM), mereka bahkan berani memutuskan untuk pergi dari rumah untuk kemudian masuk ke hutan dan bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka. Mereka mempunyai keyakinan dan kesiapan mati syahid dalam rangka memperjuangkan tanah airnya. Berbagai aturan agama seperti harus di rumah menjaga diri, tidak terlalu dipedulikan oleh mereka. Melampiaskan rasa dendam terhadap kematian suami dirasa lebih besar dan lebih penting untuk diperjuangkan, daripada hanya mengurung diri di dalam rumah untuk menangisi dan menyesali nasib.

2. *Inong Balee* antara Peran Domestik dan Peran Publik.

Sepertinya sudah menjadi hukum umum yang mengharuskan perempuan sebagai isteri bertugas mengurus dan mengatur rumah tangga, mulai membersihkan rumah hingga mendidik anak. Hal ini juga terjadi dalam sistem keluarga di Aceh. Seorang isteri mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap berbagai masalah dalam wilayah domestik. Sementara itu suami memiliki tugas mencari nafkah di luar rumah. Ketika satu saat isteri ditinggal mati

suami dan hidup menjanda, tak pelak lagi, isterilah yang paling berat menanggung beban hidup, karena harus menyelesaikan tugas di wilayah domestik serta mencari nafkah di wilayah publik sekaligus. Hal ini tentu bukanlah hal yang mudah. Menyandang status janda sampai saat ini masih merupakan satu hal yang mempunyai konotasi negatif. Belum lagi jika harus keluar rumah dan bergaul dengan banyak orang, apalagi jika orang-orang tersebut adalah laki-laki. Beban berat jelas tampak terbayang. Dalam hal ini diperlukan sebuah tekad dan keberanian di dalam diri *Inong Balee* untuk berjuang seorang diri bertugas di wilayah domestik serta publik sekaligus. Adakalanya seorang *Inong Balee* merasa tidak sanggup untuk mengurus dan mendidik anak seorang diri, selain itu juga merasa canggung jika harus mencari nafkah di luar rumah, sehingga memutuskan diri untuk kembali ke rumah orangtua.

Berkaitan dengan peran *Inong Balee* (versi GAM), keberanian dan tekad para perempuan ini untuk berperan di wilayah publik, demi melanjutkan cita-cita suami atau hanya sekedar membalaskan dendam terhadap kematian suami, tidak perlu diragukan lagi. Pilihan hidup untuk berjuang di wilayah publik atau wilayah domestik pada akhirnya memang tergantung masing-masing individu. Sebagai contoh Mualidar Rahmi, 17 tahun, memilih menyerah daripada masuk hutan. Mualidar mengaku terpaksa angkat senjata karena ayahnya, Abdul Mutalib, diangkat GAM menjadi Gubernur Sabang. Abdul Mutalib sudah lebih dulu menyerah. Alasan lelah bersembunyi di hutan juga dialunkan Ruhani, 30 tahun, warga Desa Piyeung Keuweu, Kecamatan Montasik, Aceh Besar. Sementara itu untuk urusan domestik mendidik dan mengasuh anak, beberapa anggota *Inong Balee* bahkan mengajak anak mereka untuk berjuang di wilayah publik. Hal ini terungkap saat ditangkap aparat TNI, sebagian di antara perempuan tersebut membawa anak kecil. Khairani ditangkap bersama dua anaknya yakni Yasir, 10 tahun dan Hardi yang masih berusia 3 tahun, sedangkan Ema ditangkap bersama bayinya yang baru berusia enam bulan (www.tempo-interaktif.com)

3. *Inong Balee* antara Aspek Feminin dan Aspek Maskulin

Berdasar pandangan Feminisme Etis, perempuan dengan feminitasnya pada dasarnya lebih mengembangkan aspek feminin seperti memelihara, mengasahi, dan kemampuan berkorban, sementara laki-laki dengan maskulinitas yang dimiliki cenderung le-

bih kuat untuk melindungi dan mempertahankan diri. Bagaimana dengan *Inong Balee*? Bagaimanapun juga *Inong Balee* adalah perempuan, oleh karena itu perspektif yang digunakan selama ini juga perspektif perempuan. Mereka telah kehilangan orang yang disayangi, yaitu suami atau bahkan anak, bagi mereka ini bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan. Namun demikian, nilai-nilai seperti kepedulian dan cinta kasih lebih terinternalisasi di dalam hati sanubari para *Inong Balee* ini, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak. Mereka dengan mudah dapat memaafkan si pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan suami meninggal, namun tidak mudah bagi mereka untuk melupakan. Sifat pemaaf, ini merupakan sifat yang muncul dengan dilandasi nilai cinta kasih dan nilai perdamaian.

Status janda mengharuskan mereka maju ke garis depan sebagai kepala keluarga. Dengan demikian mau tidak mau atau suka tidak suka, mengharuskan mereka untuk belajar nilai-nilai maskulin yang biasanya dimiliki oleh suami seperti keadilan, ketidakberpihakan dan tanggung jawab. Walaupun nilai-nilai ini terlihat asing bagi perempuan, namun tidak ada salahnya jika perempuan belajar menginternalisasi nilai-nilai maskulin, karena dunia ini didominasi oleh nilai-nilai maskulin.

Sementara itu, bagi *Inong Balee* (versi GAM), mereka telah belajar dan menginternalisasi dengan baik nilai-nilai maskulin, sehingga rasa dendam mereka tidak dipendam begitu saja tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perjuangan. Namun demikian ketika anggota *Inong Balee* ini berjuang, nilai-nilai feminin akan kembali digunakan seperti halnya apa yang sudah diteliti Siapno, strategi yang digunakan *Inong Balee* antara lain :

- 1) Kemampuan memimpin di belakang layar dan bukan di garis depan.
- 2) Kemampuan menggunakan bahasa tubuh sesuai dengan situasi.
- 3) Kemampuan merayu sebagai ungkapan negosiasi yang taktis.
- 4) Kebijakan untuk membaca di balik ihwal yang tampak tak penting namun sebenarnya penting.
- 5) Menunggu dan sabar, mengulur keadaan, namun bukan berarti kompromi.

Beberapa strategi tersebut, terlihat sangat kental nilai-nilai feminin, seperti kesabaran. Apa yang hendak ditunjukkan *Inong*

Balee adalah bahwa perempuan tidak perlu maju dan merebut kekuasaan tetapi dengan cara damai, sikap mengalah yang akhirnya berujung pada sebuah kemenangan. Lebih lanjut, peran anggota *Inong Balee* dalam kancah peperangan biasanya hanya ditujukan untuk mengurus kebutuhan domestik, seperti logistik dan kebutuhan medis.

Terdapat satu hal yang layak diperhatikan, bahwa pada beberapa kasus anggota *Inong Balee* ini menginternalisasikan nilai-nilai maskulin dengan demikian ekstrim. Sebagai contoh adanya kasus anggota *Inong Balee* yang maju berjuang di garis terdepan dengan menenteng senjata dan melempar granat. Apalagi jika yang dilakukan di antaranya melakukan penculikan terhadap anak-anak warga sipil. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai maskulin, yang sesungguhnya tidak layak diinternalisasi secara ekstrem. Pernahkah terbayang di benak para *Inong Balee* ini, bagaimana perasaan sang ibu yang anaknya diculik. Namun demikian hal ekstrem yang dilakukan *Inong Balee* juga dimungkinkan terjadi bukan pada kekuasaan yang hendak diraih, tetapi beberapa kiasan strategi ini terdapat dalam puisi Aceh lama, yang disebut *lheuk jago meulet*, (*lheuk* adalah sejenis burung) yang menggunakan kecerdikan dan daya pikatnya untuk menghadapi musuh.

F. KESIMPULAN

1. Konsep dan istilah *Inong Balee* sudah mengalami pergeseran arti, bukan lagi menunjuk pada janda yang ditinggal mati suami, tetapi digunakan sebagai nama pasukan perempuan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai akibat hal tersebut istilah *Inong Balee* memiliki konotasi negatif,
2. Peran dan kedudukan *Inong Balee* memiliki beberapa paradoks:
 - a. Antara tuntutan Syariat Islam dan tuntutan adat.
 - b. Antara peran wilayah domestik dan publik.
 - c. Antara feminitas dan maskulinitas.
3. *Inong Balee*, memiliki aspek feminin dan maskulin sekaligus, yang kedua-duanya bagus untuk dikembangkan.
4. Pengembangan dan internalisasi secara ekstrem terhadap nilai-nilai maskulin, tampak pada fenomena *Inong Balee* (versi GAM).

Berdasarkan kesimpulan di atas, kiranya penting dipertimbangkan hal-hal berikut: a) Diperlukan usaha untuk mengembali-

kan nama serta citra *Inong Balee* di mata masyarakat. b) *Inong Balee*, sebagai perempuan hendaknya dapat mengembangkan nilai-nilai feminin secara lebih leluasa, serta diimbangi dengan pengetahuan tentang nilai-nilai maskulin. c) Usaha perdamaian Aceh hendaknya melibatkan *Inong Balee* sebagai pelaku sekaligus saksi hidup yang mengalami penderitaan akibat kekerasan politik di Aceh.

-JF-

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian (ed), 1997, *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, LP3ES, Jakarta
- Bakker, A. dan Charris Zubair, A., 1994, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bertens, K., 1993, *Etika*, Gramedia, Jakarta.
- Brenan, Samantha, 1999, *Recent Work in Feminist Ethics*, Ethics, 109, hal. 858-893.
- Card, Claudia, 1988, *Women's Voices and Ethical Ideal : Must We Mean What We Say ?*, Ethics, 99, hal. 125-135.
- Debra Yatim, 1998, *Perempuan Aceh: Paradoks ataukah Dilema?*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- French M., 1985, *Beyond Power on Momen, Men and Morals*, Ballatine Books, New York.
- Gilligan, C., 1982, *In a Different Voice*, Harvard University Press, Massachusetts.
- Hasanuddin Y.A., 2003, *Tamaddun & Sejarah (Etnografi Kekerasan di Aceh)*, Priskasophie, Yogyakarta.
- Hasjmi,A., 1977, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Humm,M., 1992, *Feminism A Reader*, Harvester Wheatsheaf, Cambridge.
- Hurgronje,Snouck.,1996, *Aceh (Rakyat dan Adat Istiadatnya)*, INIS, Jakarta.
- Ibrahim Alfian, 2005, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Gadjah Mada press, Yogyakarta.
- Ilyas Sutan., 1957, *Rencong Di Tangan Wanita*, Brathara Karya, Jakarta

- Jackson, Stevi, Karen Atkinson, Deirdre Beddoe, Teri Brewé, Sue Faulkner, Anthea Huckleby, (ed), 1993, *Women's Studies A Reader*, Harvester Wheatsheaf, Cambridge.
- Jakobi, TGK.AK., 1998, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, Gramedia, Jakarta.
- Kohlberg, L., 1981, *The Philosophy of Moral Development*, Harper & Row, San Fransisco.
- _____, 1995, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kurtiness, W., 1992, *Moralitas, Perilaku Moral dan Perkembangan Moral*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1996, *Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya
- Mernissi, 1998, *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, Mizan, Bandung.
- Pane.Nita.S., 2001, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka*, Grasindo, Jakarta.
- Raphael D., 1947, *Moral Sense*, Oxford University Press, London.
- Reid Anthony, 2005, *Asal Mula Konflik Aceh*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suny, Ismail., 1980, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Siapno, J., 2002, *Gender, Islam, Nationalism and state in Aceh : The Paradox of Power, Co-optation and Resistance*, Routledge Curzon, London.
- Teichman, J., 1996, *Social Ethics*, terjemahan A. Sudiarja, *Etika Sosial*, Kanisius, Yogyakarta.
- Yunus Jamil, 1956, *Tawarikh Radja-Radja Keradjaan Aceh*, Banda Aceh.